

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penyerapan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017, maka penulis mengambil kesimpulan dalam segmentasi analisis penyerapan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara keseluruhan yang tebragi menjadi dua analisis yaitu rasio kontribusi PAD, dan rasio keserasian memiliki kesimpulan bahwa Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2017 memiliki penyerapan PAD terhadap belanja daerah yang sangat baik. Berikut penjelasan atas kesimpulan dari analisis Penyerapan PAD terhadap belanja daerah adalah:

1. Penyerapan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari analisis kontribusi PAD selama periode 2015 hingga 2017 hasil penelitian dikatakan sangat baik. Karena PAD dapat membiayai belanja daerah melebihi 50%. Dengan rata-rata kriteria penyerapan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang sangat baik setiap tahunnya dari periode 2015-2017 dan nilai rata-rata dari analisis menggunakan rasio kontribusi PAD adalah sebesar 64,74%.

Penyerapan PAD terhadap belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2017 dilihat dari analisis rasio keserasian. Hasil penelitian

periode 2015-2017 memiliki hasil yang terus meningkat dalam belanja tidak langsung. Dan belanja langsungnya mengalami perubahan naik turun yang signifikan yang berarti bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2017 mengalokasikan dana untuk meningkatkan belanja pembangunan. Hal ini terjadi disebabkan karena analisis menggunakan rasio keserasian dalam persentase mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan rata-rata analisis menggunakan rasio kontribusi PAD adalah sebesar 139,43%.

Berikut penjelasan tingkat delegatif di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 dari hasil penelitian menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal:

2. Kemampuan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2017 dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, penelitian pada periode tersebut memiliki pendapatan asli daerah terhadap sumber pendapatan eksternal yaitu 197,77% dengan pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu berada pada delegatif. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan Provinsi DKI Jakarta mampu mengelola anggaran pendapatan. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah tidak ikut campur lagi terhadap kemampuan pengelolaan anggaran pendapatan di Provinsi DKI Jakarta periode 2015 hingga 2017.

Kemampuan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2015 hingga 2017 dilihat dari analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, hasil

penelitian pada periode tersebut memiliki kemampuan pendapatan asli daerah terhadap total belanja yaitu sangat baik. Karena hasil analisis atas pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata dari periode 2015 hingga 2017 sebesar 66,61%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan keuangan daerah sebuah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola sumber daya yang dimiliki masih sangat baik dan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap total belanja untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyenggarakan desentralisasi fiskal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis diatas, penulis memeberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya analisis diatas dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menigkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan informasi apabila pemerintah tidak sesuai dalam penyerapan pendapatan asli daerah ataupun penggunaan belanja.
2. Pemerintah harus lebih bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta, memenuhi kebutuhan daerahnya ataupun belanja daerah. Agar Provinsi DKI Jakarta tidak bergantung terhadap anggaran pemerintah pusat.

3. Provinsi DKI Jakarta lebih menganalisa kembali penggunaan belanja daerahnya terutama digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau yang terdapat pada belanja langsung.